

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

---

## TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2025. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang sebagai panduan untuk rencana kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini belum sepenuhnya sempurna, namun kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Kami sampaikan hal ini dengan harapan agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Banda Aceh, 04 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Struktur Organisasi ..... 2

    C. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ..... 3

**BAB II PERENCANAAN STRATEGI ..... 4**

    A. Sasaran Strategis ..... 4

    B. Tujuan dan Sasaran ..... 4

**BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN ..... 6**

    A. Rencana Program Kegiatan ..... 6

    B. Kinerja Pelayanan ..... 12

**BAB IV PENUTUP ..... 18**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditentukan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam RKT ditentukan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, serta seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT mencakup penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai pada tahun tersebut, serta program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

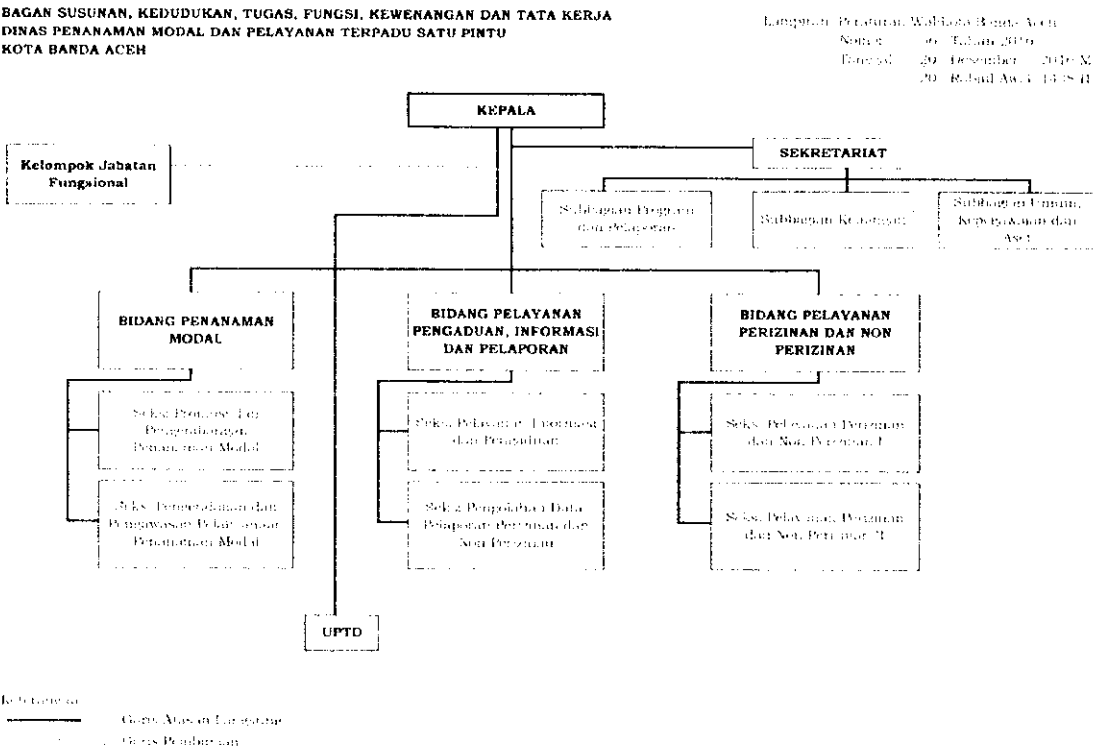
RKT adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode satu tahun yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan rincian dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh untuk periode tahunan. Dokumen ini merinci kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, serta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis. Setiap target kinerja tahunan dalam RKT ditetapkan untuk semua indikator kinerja pada tingkat sasaran kegiatan, yang menjadi komitmen instansi untuk tercapai dalam satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk periode 2023-2026, yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan non-perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berperan sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh. Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan ini, diharapkan indikator kinerja dan target yang ditetapkan dapat terukur dan tercapai, sehingga mewujudkan prinsip "*Good Governance*".

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh terdiri dari:

- 1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas
- 2. Unsur pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a) Subbagian Program dan Pelaporan
  - b) Subbagian Keuangan
  - c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - a) Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    - 1) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal.
    - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - b) Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan, membawahi:
    - 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
    - 2) Seksi Pengelolaan Data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan.
  - c) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
    - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
    - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.



### C. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan adalah perencanaan untuk periode satu tahun yang mencakup sasaran/capaian program, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang merupakan rincian dari RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dokumen perencanaan ini berisi program dan kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan arahan terhadap semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2025 DPMPTSP mengacu pada kondisi pelayanan saat ini, sehingga diharapkan RKT yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dengan demikian, pada tahun 2025, DPMPTSP dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagaimana diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. RKT juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan
2. Menjaga kesinambungan kebijakan
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian
4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja
5. Memanfaatkan fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya
6. Membina dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama
7. Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya.

Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGI**

#### **A. Sasaran Strategis**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2025. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan telah habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan untuk menyusun RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai tujuan yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal”.

Serta mempunyai Sasaran “Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui kebijakan Penanaman Modal”. Identifikasi Permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran SKPD, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penentuan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh sumber daya dalam organisasi. Setiap sumber daya dalam organisasi harus memiliki kompetensi dengan daya saing yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh SKPD dalam lima tahun ke depan.

Rencana strategis mencakup tujuan dan sasaran yang realistis dengan memperhitungkan perkembangan di masa depan. Penetapan tujuan dan sasaran ini akan menjadi landasan dalam penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), indikator sasaran DPMPSTP akan mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu:

:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- 2. Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA

*Tabel 1*  
*Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha	1 Penyediaan data dukung
		2 Peningkatan kapasitas SDM secara kualitatif dan kuantitatif	2 <i>Capacity building dan Rekrutment</i>
		3 Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	3 <i>Service Quality Management</i>
Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial.	1 Optimalnya investasi jangka panjang	1 Menyusun Kebijakan Penanaman Modal
		2 Menyusun perencanaan pengembangan investasi pada sektor-sektor yang produktif	2 Rencana umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh

### **BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

#### **A. Rencana Program Kegiatan**

Dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (DPMPTSP), menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi elemen yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah karena berfungsi sebagai komponen utama dalam Sistem (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP, yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.

Indikator kinerja dalam dokumen rencana kinerja tahunan DPMPTSP Kota Banda Aceh mencakup indikator pada tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*), yang menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan dari instansi pemerintah, serta keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah dokumen yang berisi pernyataan, kesepakatan, atau perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi. Dokumen ini mencakup sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta anggaran. Penyusunan Penetapan Kinerja 2025 dilakukan dengan merujuk pada Renstra, Renja tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rencana Kerja, Pendanaan, dan Kelompok Sasaran Tahun 2025**

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar						
2	18				DPMPTSP					9,562,803,373	
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	8,962,803,373	DPMPTSP
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	7,924,500	DPMPTSP
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	7,924,500	DPMPTSP
2	18	01	2.01		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	4,742,238,473	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	32	Orang/ Bulan	4,742,238,473	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	64,400,000	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	56	Paket	64,400,000	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	152,360,200	DPMPTSP
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	1,691,400	DPMPTSP
2	18	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	6	Paket	60,775,400	DPMPTSP

2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Paket	5,314,100	Masyarakat dan Pegawai DPMPSTP
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	21,659,300	DPMPSTP
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	62,920,000	DPMPSTP
2	18	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>176,641,200</b>	<b>DPMPSTP</b>
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	50	Unit	176,641,200	DPMPSTP
2	18	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,545,237,000</b>	<b>DPMPSTP</b>
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	1,292,000,000	DPMPSTP
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	1,253,237,000	DPMPSTP
2	18	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,274,002,000</b>	<b>DPMPSTP</b>
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Unit	234,126,000	DPMPSTP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	59	Unit	235,876,000	DPMPSTP
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	2	Unit	804,000,000	DPMPSTP

2	18	02			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Pelaku Usaha
2	18	02	2.01		<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Pelaku Usaha
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	Pelaku Usaha
2	18	02	2.02		<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Potensi dan Peluang Investasi
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	Potensi dan Peluang Investasi
2	18	03			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Investor
2	18	03	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	1	Laporan	-	Investor
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	Investor
2	18	04			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat.
2	18	04	2.01		<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Kota Banda Aceh	2	Laporan	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat.
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2500	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat.
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	500	pelaku usaha	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat.

2	18	05			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Nilai Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01		<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	-	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Banda Aceh	250	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Banda Aceh	30	Kegiatan Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	06			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	600,000,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi Penanaman Modal</b>	Kota Banda Aceh	100	%	600,000,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	600,000,000	Pelaku Usaha

## **B. Kinerja Pelayanan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh juga bertanggung jawab sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP). Mpp merupakan generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah Pusat, daerah dan BUMD maupun swasta. MPP juga menjadi fasilitas yang menjadi pusat kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi, mencakup berbagai layanan yang tersedia di Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah uraian mengenai instansi dan layanan-layanan yang ada di MPP saat ini.

Untuk ruang Fasilitas Umum terdiri dari Perbankan, Mushalla, Klinik, Layanan Mandiri, Pojok Baca, Pelaminan, Galery Charger, Fasilitas Disabilitas, Ruang Bermain Anak, Tempat Parkir Rooftop, Informasi Center dan Ruang Laktasi. Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 29 Instansi yang terdiri dari 8 instansi Pemko dan 21 instansi vertikal, dengan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.

**Tabel 3**  
**Daftar Jenis Layanan MPP Kota Banda Aceh Tahun 2025**

No	Instansi Penyelenggara Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Daftar Pelayanan	Produk Pelayanan
1	Baitul Mal kota Banda Aceh	2	Layanan ZIS Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Zakat, Infaq dan Shadaqah
2	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	3	Layanan PBB Layanan Pajak Daerah (NPWPD) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pajak & Retribusi Daerah
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	11	Layanan Retribusi Sampah Layanan Kebersihan Layanan Penyedotan Tinja Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan Layanan Pemangkasan Pohon Layanan Sewa Alat Berat Layanan Sewa Taman Sari Layanan Rekomendasi Lingkungan Layanan Izin Magang/ Penelitian Layanan sampah medis Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kebersihan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	2	Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Tapak Site Plan Perumahan
5	BP Jamsostek	3	Pendaftaran Perusahaan Baru Layanan Pengecekan Tunggakan Iuran Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Sosial Ketenagakerjaan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	2	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
7	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	6	Layanan PBG Layanan Sicantik Cloud Helpdesk OSS Layanan Mandiri OSS Layanan Mandiri LKPM Layanan Informasi & Pengaduan	Layanan Perizinan & non Perizinan

8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	13	Layanan KK Layanan KTP-el Layanan KIA Layanan Surat/akte kelahiran & Kematian Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil Layanan Data Kependudukan Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas Layanan Surat Ket. Pindah & Tempat Tinggal Layanan Surat/akte Perkawinan & Perceraian Layanan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak Layanan IKD (identitas kependudukan digital) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kependudukan
9	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh	3	Layanan Perpanjangan SKCK Layanan Laporan Kehilangan Barang Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kepolisian
10	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	3	Pembayaran Derda Pembayaran Bukti Tilang Layanan Konsultasi Hukum Gratis	Layanan Surat Tilang
11	Samsat, BPKA & Jasa Raharja	4	Pembayaran PKB Perpanjangan STNK Tahunan Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Surat Tanda Nomor Kendaraan
12	PT. TASPEN (Persero)	7	Layanan Kartu Taspen Layanan Pengajuan Berkas Kfim Layanan Estimasi Hak Peserta Otentikasi Peserta Pensiun Layanan Pendaftaran Enrollment Informasi Layanan Kfim Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Taspen
13	PT. PLN (Persero)	4	Permohonan Pemasangan Baru Permohonan Penambahan Daya Layanan Aplikasi PLN Mobile Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kelistrikan

14	BPJS Kesehatan	9	Layanan Pendaftaran Baru Layanan Pergantian Kartu Layanan Perubahan Data Layanan Perubahan Faskes Layanan Perubahan Status Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir Layanan Kartu Non Aktif Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Jaminan Kesehatan Nasional
15	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)	6	Layanan Informasi Pendaftaran Tanah Layanan Informasi Nilai Tanah & property Layanan Pendaftaran Pengembalian Batas Layanan Informasi Aplikasi Sentuh Tanahku Layanan Cek Plot/Plotting Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pemetaan Bidang Tanah
16	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	5	Layanan Haji Layanan Pernikahan Layanan Pengukuran Arah Kiblat Layanan Wakaf Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kantor Urusan Agama
17	PDAM	3	Pembayaran Rekening Air Pemasangan Baru Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Air Bersih
18	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	5	Layanan Pembuatan Paspor Baru Layanan Pembuatan Paspor Penggantian Layanan Pelaporan orang asing Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Keimigrasian
19	PT. POS Indonesia (Persero)	5	Layanan Pengiriman Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pusa, Telkom, Multifinance & OLSHOP Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah Penjualan Material Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan POS
20	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	6	Pendaftaran NPWP Secara Online Layanan Aktivasi EFIN Layanan Pembuatan Kode e-Billing Layanan Informasi KSWP Asistensi Layanan Mandiri Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Perpajakan

21	PT. LKMS Mahirah Muamallah	4	Layanan Pembukaan Rekening Layanan Penyetoran dan Penarikan Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro
22	PT. Bank Aceh	6	Layanan Penyetoran dan Penarikan Menerima Pembayaran Penerimaan Negara & Daerah Menerima Pembayaran PKB Menerima Pembayaran Perguruan Tinggi (Uinsyah & UIN) Menerima Pembayaran & Pembelian Voucher, Pusa & Witi Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Perbankan
23	Pengadilan Negeri	5	Layanan permohonan perwalian Layanan permohonan ganti nama Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran Surat keterangan di pengadilan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pengadilan
24	GAPKATINDO (Asosiasi)	4	Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha) Layanan SKA (sertifikat Keahlian) Layanan SKT (sertifikat Keterampilan) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Sertifikasi Jasa Konstruksi
25	BPOM	4	Layanan Perizinan SKI/SKE Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pengawasan Obat dan Makanan
26	Pegadaian	10	Layanan Booking Gadai Layanan perpanjangan Gadai Layanan cicil Gadai Layanan tebus gadai Layanan pembiayaan usaha Layanan pembiayaan porsi haji Layanan cicil kendaraan Layanan cicil emas Layanan tabung emas Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Gadai Emas

27	BNN	6	Konsultasi Rehabilitasi Layanan Sosialisasi Layanan SKHPN Layanan Tes Urine Rehabilitasi Rawat Jalan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Tes Urine
28	BEA CUKAI	7	Layanan pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri Layanan pembuatan kode e-Billing Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Bea Cukai
29	BSI	3	Layanan Pembukaan Rekening Layanan Penyetoran dan Penarikan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Perbankan
JUMLAH LAYANAN		151		

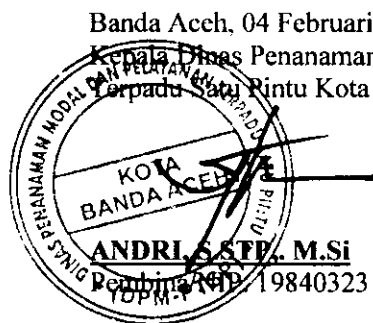
#### **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat program dan kegiatan disusun sebagai pedoman untuk rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2025. Penyusunan Rencana Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran Tahun 2025 serta sebagai komitmen untuk mencapai target yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintah yang efektif, efisien, transparan, bersih, dan akuntabel. Perencanaan kinerja ini adalah penjabaran dari sasaran dan program melalui berbagai kegiatan tahunan, dengan penetapan target kinerja tahunan untuk setiap indikator kinerja kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berfungsi sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2025.

Banda Aceh, 04 Februari 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



**ANDRI S STE. M.Si**  
Pembina 4489 19840323 200212 1 002

